



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program
Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Analisis Pengaruh Demokratisasi Amerika Serikat pada
Eskalasi Kekuasaan Taliban di Afghanistan (2014-2020)

Skripsi

Oleh

Anyamanna Leilani

6091901153

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program
Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Analisis Pengaruh Demokratisasi Amerika Serikat pada
Eskalasi Kekuasaan Taliban di Afghanistan (2014-2020)

Skripsi

Oleh

Anya Amanna Leilani

6091901153

Pembimbing

Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

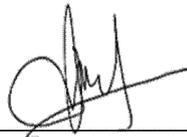
Nama : Anya Amanna Leilani
Nomor Pokok : 6091901153
Judul : Pengaruh Upaya Demokratisasi Afghanistan oleh Amerika Serikat terhadap Eskalasi Kekuasaan Taliban (2014-2020)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 13 Januari 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Sekretaris

Putu Agung Nara Indra Prima, S.IP., M.Sc

: 

Anggota

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anya Amanna Leilani

NPM : 6091901153

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : **Pengaruh Upaya Demokratisasi Afghanistan oleh Amerika Serikat terhadap Eskalasi Kekuasaan Domestik Taliban (2014-2020)**

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak yang lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 2 Januari 2023


Anya Amanna Leilani

6091901153

Abstrak

Nama : Anya Amanna Leilani
NPM : 6091901153
Judul : **Pengaruh Upaya Demokratisasi Afghanistan oleh Amerika Serikat terhadap Eskalasi Kekuasaan Domestik Taliban (2014-2020)**

American Democracy Promotion merupakan aspirasi yang telah lama tertanam di Amerika Serikat dengan keyakinan bahwa pembentukan demokrasi membawa dunia lebih dekat ke perdamaian dan stabilitas. Meskipun upaya dan dana yang dituangkan untuk mempromosikan demokrasi, Afghanistan menjadi salah satu contoh dimana *American Democracy Promotion* berupa kontraproduktif dengan peningkatan tingkat korupsi, kebutuhan pokok masyarakat yang minim serta meningkatnya kekerasan yang ditimbulkan oleh kelompok pemberontak seperti Taliban. Khususnya, dengan kebangkitan total Taliban, *American Democracy Promotion* terbukti gagal dan menghasilkan negara yang semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana demokratisasi AS di Afghanistan berkontribusi dalam meningkatkan kekuatan Taliban yang berfokus pada tahun 2014-2020. Dipandu oleh konsep Demokratisasi Jack Snyder dan *Protracted Social Conflict* Edward Azar, studi ini menemukan bagaimana proses demokratisasi AS telah meninggalkan masalah politik, budaya, dan teknis yang mengundang aktor non-demokratis seperti Taliban untuk memobilisasi kehadirannya. Lebih jauh lagi, penelitian ini melihat bagaimana Taliban mampu menunggangi gelombang demokratisasi demi keuntungan mereka. Secara keseluruhan, kajian ini mengilustrasikan demokratisasi sebagai pedang bermata dua yang penerapannya harus diimplementasi secara hati-hati dan tidak dipromosikan secara sembarangan.

Kata Kunci: Taliban, Amerika Serikat, Demokratisasi, *Protracted Social Conflict*, Eskalasi Kekuasaan, Jack Snyder, Edward Azar

Abstract

Name : Anya Amanna Leilani
NPM : 6091901153
Title : The Effect of United States Democratization Process in Afghanistan towards Taliban Escalation of Power

American Democracy Promotion represents a long-held aspiration embedded within the United States with the belief that the establishment of democracies brings the world ever closer to peace and stability. Despite countless efforts and funds, U.S. democratization efforts in Afghanistan have proved to be counterproductive, seeing a rise in levels of corruption, minimal needs of the nation upheld and alarming levels of violence posed by insurgency groups such the Taliban. Ending the nation with the total rise of the Taliban, American Democracy Promotion has proven to fail and left an agitated nation that is further away from values of democracy. With that, this study aims to analyze how U.S. democratization of Afghanistan has contributed to escalating Taliban's power that focuses on the years of 2014-2020. Guided by Jack Snyder's concept of democratization and Edward Azar's Protracted Social Conflict, this study finds how the U.S. democratization process has left perplexing political, cultural and technical issues within the nation that invite non-democratic actors like the Taliban to mobilize its presence. Furthermore, this study looks into how the Taliban is able to ride the wave of democratization to their benefit. As a whole, this study illustrates democratization as a double-edge sword who's application must be carefully applied and not idly promoted.

Keywords: Taliban, United States of America, Democratization, Protracted Social Conflict, Rise to Power, Jack Snyder, Edward Azar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Upaya Demokratisasi Afghanistan oleh Amerika Serikat terhadap Eskalasi Kekuasaan Domestik Taliban (2014-2020)”. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses demokratisasi yang diterapkan oleh AS di Afghanistan dapat berkontribusi terhadap eskalasi kekuasaan Taliban secara domestik. Adapun penelitian ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari dosen pembimbing saya, Mas Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc. Sehingga, atas bimbingan beliau, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Selain itu, saya juga hendak berterima kasih kepada orang tua, kakak-kakak serta teman-teman yang menjadi bagian dari seluruh proses penulisan skripsi ini.

Sekian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan. Akan tetapi, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat membawa perspektif baru terhadap topik tersebut.

Bandung, Desember 2021

Anya Amanna Leilani

DAFTAR ISI

Abstrak.....	1
Abstract.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR SINGKATAN.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	6
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	9
1.2.3. Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Kajian Literatur.....	13
1.5 Kerangka Pemikiran.....	21
1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data.....	29
1.6.1 Metode Penelitian.....	29
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.7 Sistematika Penulisan.....	31
BAB II DINAMIKA DAN UPAYA-UPAYA DEMOKRATISASI AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN.....	34
2.1. Sejarah Demokratisasi Amerika Serikat di Afghanistan.....	34
2.1.1. Lahirnya Demokratisasi oleh Amerika Serikat di Afghanistan.....	34
2.1.2. Kepentingan Amerika Serikat dalam Upaya Demokratisasi Afghanistan.....	36
2.2. Upaya Demokratisasi AS di Afghanistan (2014-2020).....	39
2.2.1 Dinamika Upaya Demokratisasi Amerika Serikat.....	39
2.2.2 Upaya Demokratisasi Amerika Serikat di Afghanistan (2014-2016)....	42
2.2.3 Upaya Demokratisasi Amerika Serikat di Afghanistan (2017 - 2020)...	47
BAB III IMPLIKASI DEMOKRATISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KONDISI TALIBAN DI AFGHANISTAN (2014 - 2020).....	51

3.1. Gambaran Umum terhadap Kondisi Negara Afghanistan dan Kelompok Taliban.....	51
3.1.1. Kondisi Negara Afghanistan dan Taliban.....	51
3.1.2. Karakteristik Transisi Demokratisasi di Afghanistan.....	53
3.2. Implikasi Demokratisasi Amerika Serikat di Afghanistan (2014 - 2020)	55
3.2.1 Implikasi Demokratisasi Amerika Serikat terhadap Sistem Politik Afghanistan.....	55
3.2.2 Implikasi Demokratisasi Amerika Serikat terhadap Hukum Afghanistan.....	58
3.2.3 Implikasi Demokratisasi Amerika Serikat terhadap Kondisi Ekonomi Afghanistan.....	61
3.2.4. Implikasi Demokratisasi AS terhadap Kondisi Sosial Afghanistan	64
3.3. Kondisi Taliban dalam Konteks Demokrasi Afghanistan.....	68
3.3.1. Taliban dalam Sistem Politik dan Hukum Demokratisasi Afghanistan.....	68
3.3.2. Taliban dalam Dinamika Sosial Demokratisasi Afghanistan.....	72
3.3.3. Taliban dalam dinamika Ekonomi Demokratisasi Afghanistan.....	77
BAB IV ANALISA IMPLEMENTASI DEMOKRATISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP ESKALASI KEKUASAAN TALIBAN.....	80
4.1. Melemahnya Kondisi Institutional Pemerintahan terhadap Eskalasi Kekuasaan Taliban.....	81
4.1.1. Pengaruh Pemerintahan Ashraf Ghani yang terisolasi terhadap Eskalasi Kekuasaan Taliban.....	82
4.1.2. Ketergantungan Demokratisasi Afghanistan terhadap Bantuan Internasional.....	86
4.2. Peran Dampak Demokratisasi terhadap Kultur Masyarakat Afghanistan dan Eskalasi Kekuasaan Taliban.....	89
4.2.1. Mengabaikan Konteks Kultur Afghanistan dalam Proses Demokratisasi.....	89
4.2.2. Metode Demokratisasi dan Identitas Nasional.....	94
4.3. Ideologi Demokratisasi dan Dampaknya terhadap Eskalasi Kekuasaan Taliban.....	97
4.3.1. Ideologi Demokratisasi yang dibangun dengan Tujuan Counterinsurgency.....	98
4.3.2. Inkonsistensi Ideologi Demokratisasi AS terhadap Eskalasi Kekuasaan Taliban.....	100
4.4. Protracted Social Conflict dalam Eskalasi Kekuatan Taliban.....	102
BAB V KESIMPULAN.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Graphic Kategori Pendanaan Demokrasi (2002-2011)	34
Gambar 1.2	Graphic Kategori Pendanaan Demokrasi (2012-2020)	35
Gambar 1.3	Graphic Analisis Korelasi Pre-Kondisi Konflik dan Eskalasi Kekuasaan Taliban	107

DAFTAR SINGKATAN

ACJC	Anti Corruption Justice Center
ANSF	Afghanistan National Security Force
ARLOP	Afghanistan Rule of Law
AS	Amerika Serikat
NUG	<i>National Unity Government</i>
PBB	Perserikatan bangsa-bangsa
PSC	Protracted Social Conflict
SARA	Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
SNTV	Single Non-Transferable Vote
USAID	United States Agency for International Development

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Afghanistan merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang hingga tahun 2022 mengalami berbagai isu internal dari isu ekonomi, hak asasi manusia hingga keamanan bagi masyarakatnya. Afghanistan berada pada ranking terakhir di Global Peace Index dengan nilai 3.554 pada tahun 2022.¹ Hal tersebut mengindikasikan kuantifikasi aksi kekerasan yang tinggi, tingkat keterlibatan dalam konflik internal negara dan kondisi keamanan yang hadir dalam negara tersebut. Meskipun kondisi negara yang kini tidak mencapai tingkat kedamaian yang memadai, Afghanistan merupakan negara yang memiliki berbagai bantuan internasional yang untuk bertahun-tahun berupaya mencapai keamanan dan kedamaian di negara tersebut.² Sebagai upaya perdamaian terbesar, Afghanistan merupakan salah satu bentuk upaya demokratisasi oleh Amerika Serikat pada abad ke-20 yang menekankan peran komunitas internasional dalam mendorong sistem politik demokrasi dengan kepercayaan bahwa sistem demokrasi merupakan sistem paling optimal untuk pertumbuhan sebuah negara.³ Dengan dinamika kompleks yang hadir di kawasan Afghanistan, sejak tahun 2001 AS memiliki tujuan untuk diseminasi ide-ide demokrasi melalui berbagai mekanisme dengan harapan demokrasi dapat memicu modernisasi, stabilitas serta menghambat

¹ Vision of Humanity, "Global Peace Index", Diakses pada 1 October 2022, <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

² Ibid.

³ Peter Harris & Ben Reilly, "Democracy and Deep Rooted Conflict: Options for Negotiators", (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 1998), pp. 19-21.

meradangnya kekerasan yang terjadi akibat kelompok insurgensi Taliban di negara mereka.⁴

Dalam sejarahnya, “*American Democracy Promotion*” merupakan sebuah upaya nasional oleh Amerika Serikat untuk menitikberatkan dan menyebarkan ide-ide demokrasi dalam skala internasional dengan harapan membangun kondisi dunia yang aman dan sejahtera.⁵ Promosi Democracy oleh AS memiliki ciri upaya untuk mengeksport model demokrasi liberal Amerika berdasarkan pembangunan institusi, pasar bebas, fokus pada pemilu, supremasi hukum, dukungan masyarakat sipil dan perlindungan hak-hak dasar.⁶ Bereskalasi pada era Perang Dingin, demokrasi merupakan bagian esensial dalam kebijakan luar negeri AS dengan misi mempromosikan demokrasi sebagai *means* mencapai keamanan, stabilitas serta membantu dan memfasilitasi negara dengan penerapan demokrasi dini.⁷ Selaras dengan misi yang AS miliki, implementasi sistem demokrasi dalam 30 negara sejak tahun 1974-2001, menjadi *legacy* AS yang dapat membangun kondisi dunia yang mendukung kepentingan nasional AS.⁸ Proses Demokratisasi menjadi unsur vital bagi Amerika Serikat dimana dengan memanifestasi cara pandang demokrasi kepada sistem dan institusi sebuah negara dapat

⁴ Marian L. Lawson, Susan B. Epstein, “Democracy Promotion: An Objective of U.S. Foreign Assistance”, (Congressional Research Service Report, January 2019), pp.4-6. <https://sgp.fas.org/crs/row/R44858.pdf>

⁵ Kelly Magsmem, “Securing a Democratic World: The Case Study for Democratic Values-Based U.S. Foreign Policy”, (Center for American Progress (CAS), 2018), <https://www.americanprogress.org/article/securing-democratic-world/>

⁶ Ibid, pp. 5-10.

⁷ JF Sopko, “What We Need to Learn: Lessons from Twenty Years of Afghanistan Reconstruction”, (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 2021), p. 16, [https://www.sigar.mil/pdf/lessons learned/SIGAR-21-46-LL.pdf](https://www.sigar.mil/pdf/lessons%20learned/SIGAR-21-46-LL.pdf)

⁸ “Fact Sheet: Announcing the Presidential Initiative for Democracy Renewal”, The White House, December 2021, Accessed on 1 March 2022, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/state-ments-releases/2021/12/09/fact-sheet-announcing-the-presidential-initiative-for-democratic-renewal/>

mengoptimalkan kondisi dunia yang dipercayai menguntungkan bagi semua pihak.⁹ Menurut peneliti Sean Lynn-Jones, keamanan, kemakmuran, dan kekuatan abadi Amerika bergantung pada kelangsungan dan keberhasilan demokrasi—baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁰

Eksistensi upaya demokratisasi AS meningkat dalam prevalensi di wilayah Middle East and North Africa (MENA) dengan upaya membawa arus demokratisasi kepada negara-negara yang terkekang dalam sistem politik otoritarian. Lebih dari 2 miliar USD dialokasikan setiap tahunnya dalam dekade terakhir kepada dana bantuan luar negeri bagi aktivitas yang mempromosikan demokrasi di negara-negara MENA.¹¹ Khususnya, di Afghanistan, lebih dari 42 miliar USD telah diberikan sejak tahun 2014-2020 untuk berbagai upaya keamanan, *governance and development* dan bantuan *humanitarian* yang mendukung sistem demokrasi di Afghanistan.¹² Afghanistan menjadi negara yang vital bagi AS dalam demokratisasi karena kondisi internal Afghanistan yang bertahun-tahun dikuasai oleh sistem otoriter dan menjadi ancaman bagi kawasan Timur Tengah serta dunia internasional dalam konteks terorisme. Afghanistan diwarnai dengan sistem politik yang memiliki tingkat korupsi tinggi, sistem

⁹ JF Sopko, “What We Need to Learn: Lessons from Twenty Years of Afghanistan Reconstruction”, (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 2021), p. 18-21, https://www.sigar.mil/pdf/lessons_learned/SIGAR-21-46-LL.pdf

¹⁰ Sean M. Lynn-Jones, “Why the United States Should Spread Democracy”, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, March 1998, Diakses pada 16 Februari 2022, <https://www.belfercenter.org/publication/why-united-states-should-spread-democracy>

¹¹ Marian L. Lawson, Susan B. Epstein, “Democracy Promotion: An Objective of U.S. Foreign Assistance”, (Congressional Research Service Report, January 2019), pp.10-15. <https://sgp.fas.org/crs/row/R44858.pdf>

¹² Anna Larson, “Democracy in Afghanistan: Amid and Beyond Conflict”, (United States Institute of Peace, 2021), pp. 2, <https://www.usip.org/publications/2021/07/democracy-afghanistan-amid-and-beyond-conflict>

pemilu yang terancam minim transparansi serta tidak adanya media independen dan *civil society* yang aktif.¹³ Afghanistan menjadi misi bagi AS dimana transisi demokrasi yang holistik dan membangun kondisi hidup yang menjamin dengan tujuan akhir menjaga kedamaian kawasan serta melawan kelompok insurgensi yang merajalela.

Upaya demokratisasi di Afghanistan fokusnya pada tahun 2014-2020, di bawah kepemimpinan Ashraf Ghani menghadapi berbagai kondisi serta perubahan upaya yang terus dibimbing oleh AS. Proses demokratisasi Afghanistan melibatkan berbagai aktor internal AS seperti *United States Agency for International Development (USAID)*, *Middle East Partnership Initiative (MEPI)* serta *National Endowment for Democracy (NED)* yang bekerja dalam koridor pendanaan, *social development* serta upaya militer yang mendorong proses demokratisasi di Afghanistan hingga tahun 2021.¹⁴ Dengan segala organisasi yang diperankan untuk membantu proses demokratisasi, metode demokratisasi tersebut dilakukan melalui pola perpaduan antara *top-down approach* yang memberdayakan tekanan diplomatik dan peran militer untuk penerapan pemerintahan demokratis serta *bottom-up approach* yang memberdayakan pendanaan untuk transisi demokrasi bertahap.¹⁵ Untuk bertahun-tahun upaya AS di Afghanistan pada intinya bertujuan untuk membangun sistem negara yang mendukung kondisi yang *equal* dan *fair* melalui membangun proses pemilu yang

¹³ Afghanistan Study Group, "A Pathway for Peace in Afghanistan", (United States Institute for Peace, February 2021, pp. 32), https://www.usip.org/sites/default/files/2021-02/afghanistan_study_group_final_report_a_pathway_for_peace_in_afghanistan.pdf

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Anna Larson, "Deconstructing Democracy in Afghanistan", (Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2011), pp. 8-13, <https://www.refworld.org/pdfid/4dbfc8c72.pdf>

kredibel dengan mendanai pemilu, membina partai politik, dan melatih petugas dan pemantau pemilu hingga pemilu terakhir di tahun 2018.¹⁶ Dalam sistem politiknya, AS juga memiliki berbagai upaya mengurangi tingginya korupsi di pemerintahan Afghanistan untuk meningkatkan kinerja dan legitimasinya. Lepas dari sistem politik, AS berkontribusi dalam ranah edukasi, *development training* serta infrastruktur dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam upaya demokratisasi, AS kerap memadukan kepentingannya dalam menangani isu kekerasan dan perkembangan masyarakat dengan anggapan bahwa kedua unsur merupakan hal yang saling bergantung.

Meskipun upaya demokratisasi yang AS harap akan membawa kedamaian bagi Afghanistan, secara realita Afghanistan terus menghadapi berbagai rintangan dan mengalami berbagai gejala dalam kondisi keamanan yang diperburuk oleh peran Taliban. Berfokus pada masa kepresidenan Ashraf Ghani, jumlah Taliban fighters sendiri telah meningkat dari 20,000 di tahun 2014 ke 80,000 di tahun 2018.¹⁷ Pesatnya peningkatan jumlah anggota Taliban yang diiringi dengan skeptisisme terhadap sistem demokrasi di masa dimana upaya demokratisasi terus berjalan merupakan sebuah fakta yang tidak sesuai dengan ekspektasi AS maupun pemerintahan Afghanistan. Dengan kondisi yang sedemikian rupa, penelitian ini berupaya untuk menganalisa dan melihat peran demokratisasi terhadap kelompok eskalasi kekuasaan kelompok non-demokratis seperti Taliban di Afghanistan.

¹⁶ Jennifer Brick Murtazashvili, "The Collapse of Afghanistan", (Journal of Democracy John Hopkins University Press, Volume 33 January 2022), pp. 40-54, <https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-collapse-of-afghanistan/>

¹⁷ Jon Gambrell, "Mapping the Afghan War, While Murky, Points to Taliban", (AP News, April 2021), diakses 1 Maret 2022, <https://apnews.com/article/taliban-middle-east-3ef479b1de676f00dd16dc8dcf6f4d0e>

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Upaya demokratisasi AS di Afghanistan merupakan isu yang disoroti dalam dunia internasional dengan fakta bahwa meskipun implementasi demokratisasi sudah berjalan untuk lebih dari 30 tahun, demokratisasi AS di Afghanistan menunjukkan pola yang kontra-produktif. Realita tersebut mendorong penelitian ini untuk mengeksplorasi kekurangan di balik proses demokratisasi dan bagaimana dinamika tersebut dapat menimbulkan akses untuk aktor-aktor non-demokratis di Afghanistan. Sebagai landasan masalah, patut digambarkan bahwa Afghanistan terus memiliki peningkatan dalam konflik internal beriringan dengan proses demokratisasi yang dilakukan oleh AS. Kondisi internal yang dialami oleh Afghanistan merupakan sebuah *intrastate conflict* yang terpicu akibat terbentuknya kelompok nasionalis Sunni Islam dan Pro-Pashtun yang dikenal sebagai Taliban yang pada tahun 2021 kembali memegang kekuasaan di Afghanistan. Konflik Taliban di Afghanistan merupakan sebuah konflik yang berlarut sejak awal tahun 1990 dengan peran Taliban yang gigih dengan tujuan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Afghanistan dan menegakkan versi tersendiri dari Syariah, atau hukum Islam, setelah berkuasa. Dalam upayanya untuk memenuhi tujuannya, kelompok Taliban menghasilkan konflik yang hingga kerap terjadi. Khususnya, dalam periode Ashraf Ghani (yang menjadi periode terakhir sebelum kembalinya kekuasaan Taliban pada tahun 2021) berbagai konflik kekerasan yang mencapai 8240 serangan insurgen pada perempat

terakhir tahun 2019.¹⁸ Selain itu, pada tahun 2018 penelitian oleh BBC menemukan bahwa Taliban memegang 70% kekuasaan di Afghanistan.¹⁹ Konflik kekerasan tersebut mendampaki warga sipil dan aparat keamanan dimana presiden Ashraf Ghani mengatakan lebih dari 28.000 polisi dan tentara Afghanistan telah tewas sejak 2015 yakni rata-rata sekitar 20 per hari.²⁰

Dinamika konflik di Afghanistan yang kerap terjadi dapat dikatakan sangat bertolak-belakang dengan tujuan AS untuk membantu membentuk sebuah pemerintahan, membangun kondisi hidup yang sejahtera untuk masyarakat Afghan serta membangun *resiliensi* terhadap ancaman teroris. Kondisi tersebut mengangkat pertanyaan antara korelasi demokratisasi dan konflik yang menjadi fokus pada identifikasi masalah penelitian ini. Korelasi antara demokrasi dan konflik didasari dengan penelitian oleh Immanuel Kant yang mengedepankan asumsi bahwa negara yang menganut sistem demokrasi segan untuk terlibat dalam konflik bersenjata dengan konflik lain.²¹ Pada hakikatnya, demokrasi dianggap sebagai alat pereda konflik dengan asumsi lebih banyaknya negara demokrasi membuat sistem internasional lebih damai.²² Lantas demokrasi dapat digunakan sebagai implementasi pembawa progress dan pereda konflik dalam sebuah negara. Namun berbagai peneliti, seperti Mansfield dan Snyder, memiliki pandangan

¹⁸ Jessica Donati, "Taliban-led Attacks in Afghanistan Hit 10 Year High", (The Wall Street Journal, 2020), diakses pada 2 November 2022, <https://www.wsj.com/articles/taliban-led-attacks-in-afghanistan-hit-10-year-high-11580446861>

¹⁹ Shoaib Sharifi and Louise Adamou, "Taliban threaten 70% of Afghanistan, BBC finds", (British Broadcasting Channel, 2018), <https://www.bbc.com/news/world-asia-42863116>

²⁰ "Taliban Militant Kill Dozens at Afghanistan Intelligence Base", (BBC, 2019), diakses pada 1 Maret 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-46957955>

²¹ Olle Tornquist, "Power, Conflict and Democracy: An Analytical Framework", PCD Journal Vol. 1, pp. 19-23, <https://media.neliti.com/media/publications/362-EN-power-conflict-and-democracy-the-analytical-framework.pdf>

²² Ibid.

berbeda terhadap demokrasi dalam konflik yang melihat demokrasi sebagai faktor pengaruh konflik yang akan lebih dibahas dalam bagian konsep.

Dengan kondisi tersebut, terlihat bahwa bantuan yang telah diberikan oleh AS tidak memadai *end goal* yang mereka harapkan serta dapat dianalisa faktor apa yang mempengaruhi kondisi tidak optimal yang hadir. Secara realita, proses demokratisasi di Afghanistan menunjukkan progres yang stagnan dengan angka indeks demokrasi 2.77 pada tahun 2014 dan hanya 2.85 sebelum kembali berkuasanya Taliban pada tahun 2021.²³ Afghanistan menunjukkan progres demokrasi yang sulit dicapai dengan *functioning of government* sebagai kontributor terbesar dengan nilai hanya 0.43 berdasarkan indeks demokrasi. Ditambah kultur politik yang serendah 2.50²⁴ berkat terpecahnya persepsi masyarakat terhadap sistem demokrasi yang diimplementasikan oleh pemerintah Afghanistan yang dibantu oleh komunitas internasional serta didampaki oleh pengaruh Taliban di wilayah tersebut. Bukan hanya itu, seiring dengannya progres demokratisasi yang stagnan, terlihat meningkatnya pengaruh kuasa Taliban di Afghanistan. Hal tersebut terlihat dari statement Taliban yang mengatakan bahwa mereka menguasai 12 distrik dan memiliki pengaruh besar dalam 61 distrik Afghanistan.²⁵ Tak terpungkiri hambatan dalam sistem demokrasi seperti kekerasan yang terjadi selama pemilu 2018 yang mengakibatkan pemilu untuk

²³ The Economist Intelligence Unit, “ Democracy Index 2020 A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest”, (The Economist, 2020), diakses pada 1 Maret 2022, <https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/ Democracy-Index-2020.pdf>

²⁴ *ibid.*

²⁵ James Dobbins, Jason Campbell, “DDR in Afghanistan: Disarming, Demobilizing, and Reintegrating Afghan Combatants in Accordance with a Peace Agreement”, (RAND Corporation, 2020), pp.4, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE300/PE343/RAND_PE343.pdf

diundurkan 2 kali serta meninggalnya 78 warga dan aparat negara serta 480 terluka akibat aksi kerusuhan selama pemilu.²⁶

Kompleksitas pola antara upaya demokratisasi dan kondisi *real* di Afghanistan menunjukkan bahwa upaya demokratisasi di Afghanistan sangat didampaki oleh kondisi domestik khususnya peran Taliban di negara. Namun melihat kompleksitas di balik kondisi demokratisasi, penelitian ini tidak berhenti pada pandangan tersebut dimana ingin mengevaluasi korelasi antara proses demokratisasi oleh AS dengan meningkatnya pengaruh atau eskalasi kekuasaan Taliban dalam wilayah. Dengan *status quo* bahwa demokrasi dapat membawa kondisi damai dan optimal untuk negara untuk beroperasi, deskripsi masalah yang telah dipaparkan menunjukkan sebuah anomali. Terlihat bahwa dengan upaya demokratisasi mau akibat struktural, ideologi ataupun kultur, tidak dapat menghasilkan kondisi yang aman dan sejahtera di Afghanistan melainkan berpotensi dalam berkontribusi atas terjadinya konflik yang tak terhenti-henti. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana proses demokratisasi oleh AS di Afghanistan dapat mempengaruhi eskalasi kuasa Taliban secara domestik.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus untuk membahas eskalasi kekuasaan Taliban di Afghanistan dan bagaimana dampak ideologi dan proses demokratisasi AS menjadi faktor yang berkontribusi pada *puzzle* kejadian tersebut. Dalam upaya

²⁶ Mujib Mashal, Fahim Abed and Fatima Faizi, "Afghanistan Votes for Parliament Under Shadow of Taliban Violence", (New York Times, October 2018), diakses pada 1 Maret 2022, <https://www.nytimes.com/2018/10/20/world/asia/afghanistan-election-vote.html>

melihat faktor bagaimana sistematis atau kultural di balik cara proses demokratisasi oleh AS di Afghanistan mempengaruhi eskalasi kuasa Taliban di Afghanistan, penelitian ini akan berfokus pada upaya demokratisasi AS di Taliban antara tahun 2014-2021 yakni masa kepresidenan Ashraf Ghani di Afghanistan hingga sebelum pengambilan kuasa oleh Taliban. Selain itu, Hal tersebut bertujuan untuk memberi gambaran sistem demokratisasi pada masa yang menurun di Afghanistan untuk melihat bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kapabilitas Taliban. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor sistematis atau institusi yang melakukan dan menerapkan demokratisasi serta faktor kultural dalam masyarakat Afghanistan agar dapat menilai penerapan demokrasi dan persepsi masyarakat terhadap demokrasi agar melihat pola pengaruh demokratisasi terhadap meradangnya pengaruh Taliban.

1.2.3. Perumusan Masalah

Dinamika penerapan demokratisasi di Afghanistan yang dipimpin oleh upaya *assistance* dan *development* dari AS terlihat belum menemukan sinergi yang baik dimana progres demokrasi Afghanistan terlihat stagnan. Berbarengan dengan kondisi ini, pengaruh Taliban secara domestik terus meradang dengan meningkatnya pengikut Taliban dari masyarakat Afghanistan yang menolak transisi demokrasi di bawah pemerintah Afghanistan yang digandeng dan bergantung erat oleh upaya demokratisasi AS. Berdasarkan kondisi yang telah dipetakan, penelitian ini berupaya menganalisa pertanyaan penelitian **“Bagaimana proses demokratisasi AS kepada Afghanistan mempengaruhi**

eskalasi kekuasaan domestik Taliban (2014 - 2020)”. Dengan harapan mengeksplorasi pola antara proses, mekanisme dan tujuan demokratisasi yang AS picu serta upayakan di Afghanistan, penelitian ini bertujuan dapat memecahkan cara proses demokratisasi sendiri dapat mempengaruhi eskalasi pengaruh Taliban di tahun menuju kuasa Taliban di tahun 2021.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tiga hal utama. Pertama penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses demokratisasi AS di Afghanistan selama kepemimpinan Ashraf Ghani dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi eskalasi kekuatan Taliban di Afghanistan. Dengan analisa mendalam, diharap dapat memperlihatkan korelasi dari upaya intervensi, dibawah konsep demokratisasi, terhadap terpicunya konflik internal dalam sebuah negara. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor apa khususnya dalam demokratisasi AS yang dapat memicu meningkatnya dan berlarutnya kuasa Taliban. Hal tersebut tercapai dengan memperlihatkan proses, metode dan ideologi di balik demokratisasi yang mempengaruhi konflik lintas-batas negara.

Terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali ide-ide yang timbul dalam *peace and democracy* agar meneliti implikasi demokratisasi terhadap keamanan negara dan status quo yang timbul dari pikiran kaum liberalisme. Dengan melihat kondisi ril yang berkaca pada reaksi masyarakat, ideologi masyarakat dan konformitas masyarakat terhadap ide demokratisasi yang

ditekankan oleh negara barat dapat memberi gambaran lebih terhadap dinamika demokratisasi dalam negara berkonflik seperti Afghanistan. Lantas, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana proses demokratisasi berkorelasi ke sebagaimana semakin protracted dan berlarut-larutnya entitas Taliban di Afghanistan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hubungan internasional dengan melihat peran demokratisasi antar negara dan implikasinya terhadap resolusi konflik yang ditujukan. Penelitian ini dapat menjelajahi beberapa faktor seputar konsep *democracy and peace* untuk memperlihatkan dampak demokratisasi bagi negara penerima. Serta dalam dimensi lain memberi pandangan baru terhadap negara pelaku demokratisasi dan konteks penerapan demokratisasi. Agar mencapai kegunaan tersebut dapat didukung dengan beberapa pencapaian yang diharapkan dari penelitian ini yakni;

1. Menggambarkan peran demokratisasi terhadap ranah domestik Afghanistan dalam segi ideologi, metode dan kultur.
2. Berguna dalam menunjukan dinamika penerapan demokratisasi dalam negara berkonflik dan efek/implikasi jangka panjang yang dapat terjadi.
3. Memperkaya penelitian kajian konflik dan perdamaian dalam bentuk resolusi konflik di Afghanistan dengan mengkritisi *peace and democracy* dalam konteks negara tersebut.

4. Membangun analisa yang memperlihatkan *lessons learned* bagi *democracy promotion* agar berkontribusi untuk strategi meminimalisir berlarutnya *intra-state conflict* lainnya.
5. Memberi pandangan alternatif pada status quo dan premise dari *Democracy Peace Promotion* kaum liberalisme bahwa demokrasi bukanlah satu-satunya solusi dalam mencapai perdamaian dunia.

1.4 Kajian Literatur

Melihat peran demokratisasi AS di Afghanistan dan dampaknya terhadap eskalasi kekuatan Taliban merupakan sebuah fokus topik yang diamati oleh berbagai peneliti yang memberi pandangannya masing-masing. Dengan melihat dan menelusuri berbagai penelitian yang telah mengkaji topik tersebut memberi kedalaman dalam penelitian ini dengan tersedia berbagai perspektif yang memperdalam pengertian. Berbagai argumen dan pandangan dapat ditemukan yang berargumen seputar peran *peace and democracy*, dampak demokrasi terhadap terorisme dan dinamika konflik di Afghanistan dalam naungan demokratisasi AS yang memberi pola-pola menarik sebagai fondasi penelitian ini. Khususnya, penelitian ini berfokus pada kajian demokrasi dan konflik yang berbasis pandangan barat terhadap demokrasi dan juga pandangan non-barat.

Dalam penelitian pertama yang berjudul “**Democracy and the Rule of Law in Afghanistan: A Cautionary Tale**” oleh Mehdi J.Hakini pada tahun 2022 memberi analisa berbasis historis terhadap penerapan demokrasi di Afghanistan sejak inepsinya pada tahun 2001. Penelitian ini berargumen bahwa tahun 2001 merupakan waktu prima bagi Afghanistan untuk lepas dari masa lalunya yang

problematik dan tidak sejahtera namun pengaplikasian metode-metode keamanan seperti demokrasi tidak dijalankan dengan efektif dan efisien akibat *democratic government* yang memegang kuasa di negara.²⁷ Pada intinya penelitian ini menyoroti fakta bahwa viabilitas demokrasi di Afghanistan bergantung pada *institutional compliance of the rule of law of democracy* yang minim perannya di Afghanistan.²⁸ Menurut Hakini terjadi kemunduran konstitusi atau yang ia sebut *constitutional retrogression* yang menjadi sumber pokok masalah penerapan demokrasi di Afghanistan. Penelitian ini memiliki *state-centric view* terhadap kegagalan demokrasi di Afghanistan yang melihat isu internal Afghanistan sendiri menjadi sumber kegagalan demokrasi yang sah seperti kegagalan separasi kekuatan saat perubahan sistem politik, penjangkauan eksekutif yang merajalela dan sistem pemilihan yang kurang baik. Hal tersebutlah yang merusak legitimasi di balik demokrasi Afghanistan dan menghasilkan peningkatan kekuasaan Taliban pada akhir 2021.

Kontras dengan pandangan yang diatas, penelitian oleh Achmad Akbari yang berjudul **“The Relationship Between Democracy and War in Afghanistan”** menyoroti faktor eksternal yang berkontribusi pada konflik yang hadir di Afghanistan. Penelitian ini menekankan bahwa adanya korelasi antara tipe sistem politik terhadap stabilitas dan keamanan di Afghanistan yang menitikberatkan harapan demokrasi kepada negara ini.²⁹ Namun penelitian ini menekankan dinamika peran-peran eksternal seperti ide, *interest* dan *values*

²⁷ Mehdi J. Hakimi, “Democracy and the Rule of Law in Afghanistan: A Cautionary Tale”, (The Fletcher Forum of World Affairs, February 2022), <https://ssrn.com/abstract=4040389>

²⁸ Ibid. 16

²⁹ Akbari, Ahmad Faisal, “The Relationship Between Democracy and War in Afghanistan”, (SSRN, January 15, 2022), <https://ssrn.com/abstract=4013811>

demokrasi AS yang mempengaruhi banyak faktor dari sistem politik Afghanistan. Demokrasi yang dimodel terhadap kepercayaan masyarakat barat membangun sistem demokrasi yang bergantung pada bantuan dan dukungan luar negeri.³⁰ Hal tersebut mendampaki dinamika keamanan dalam Afghanistan karena ketergantungan menimbulkan *national and regional backlash* dan kondisi mengkhawatirkan jika tidak adanya dukungan tersebut.³¹ Sehingga penelitian ini menekankan sistem politik yang dibentuk dan dijaga oleh pihak barat terutama AS sebagai sumber konflik dan perang yang timbul di Afghanistan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, **“Stalling Democracy in the Middle East: Failures of US Foreign Policy or the Absence of Democratic Culture?”** oleh Erik Paaneen memberi pandangan lebih mendalam terhadap peran kebijakan luar negeri AS dalam kontribusi terhadap macetnya sistem demokrasi di Timur Tengah; studi kasus Libya, Iraq dan khususnya Afghanistan. Secara jelas, penelitian ini berargumen bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi alasan kurangnya demokrasi di Afghanistan serta berargumen bahwa minimnya kultur demokratis bukanlah faktor utama yang menghasilkan hal tersebut.³² Penelitian ini berpandangan bahwa kultur dan penerimaan terhadap demokrasi pada hakikatnya sangat hadir diantara masyarakat Afghanistan namun mereka digagalkan oleh kebijakan AS yang tidak mendukung dan memfasilitasi kondisi yang optimal untuk mencapainya. Penelitian ini juga berargumen bahwa AS memiliki “liberal internationalist tendencies in its foreign policy” yang berarti

³⁰ Ibid, 13-16.

³¹ Ibid.

³² Erik Paaneen, “Stalling Democracy in the Middle East: Failures of US Foreign Policy or the Absence of Democratic Culture?”, (Linne University Kalmar Vajox Sweden, 2022), <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1628477&dswid=-7387>

adanya interest yang mereka garap melalui kebijakan yang mereka lakukan sama halnya dalam demokratisasi yang mereka lakukan. Demokratisasi hanyalah menjadi alat yang mendukung interest inheren AS dimana saat sudah memenuhi interest mereka akan terabaikan. Berbeda dari penelitian lainnya, penelitian ini menekankan bahwa demokrasi sendiri bukanlah sumber konflik, melainkan peran pihak eksternal yang memiliki implikasi besar pada dinamika negara.

Kajian berikut yang berjudul, **“US Intervention in Afghanistan: Justifying the Unjustifiable”** oleh Leoni Connah melanjutkan argumen peran AS dalam pengaruh konflik di Afghanistan melalui pandangan yang mengkritik kehadiran dan motivasi AS di Afghanistan sendiri. Penelitian ini berargumen bahwa AS menyalahgunakan intervensi di Afghanistan sebagai sebuah justifikasi penggunaan kekerasan di wilayah tersebut yang menimbulkan pola konflik yang tak berhenti-henti.³³ Penelitian ini menjelajahi bagaimana intervensi eksternal, strategi dan narasi militer, dan pembenaran oleh AS berkontribusi pada kegagalan negara di Afghanistan. Connah menekankan bahwa upaya AS yang berbasis militer tidak cukup untuk mencapai tingkat demokratisasi yang diharapkan.³⁴ Sehingga terlihat “loss of appetite” untuk intervensi militer di wilayah. Penelitian ini menekankan intervensi AS sendiri memerlukan perubahan intensi membantu Afghanistan dari *interest-based* menjadi *humanitarian-based*.³⁵ Dengan demikian, penelitian ini lebih fokus pada bentuk intervensi yang dilakukan dan bagaimana

³³ Leoni Connah, “US intervention in Afghanistan: Justifying the Unjustifiable?”, (South Asia Research Volume: 41 issue: 1), pp. 73-79, <https://doi.org/10.1177/0262728020964609>.

³⁴ Ibid, 77-80

³⁵ Ibid, 83.

hal tersebut berkontribusi pada konflik yang terjadi dalam konteks terorisme dalam negara.

Dalam upaya memberi pandangan holistik pada topik *democracy and peace*, penelitian ini melihat kajian-kajian yang memiliki pandangan non-barat terhadap topik tersebut. **“Islam and Democracy: Conflicts and Congruence”** karya MD Nazrul Islam memberi pandangan non-barat dalam topik Islam dan demokrasi. Dalam jurnalnya, Nazrul menggambarkan korelasi antara Islam dan democracy yang menurutnya “go hand-in-hand”.³⁶ Nazrul berargumen bahwa meskipun filsafat doktrinal Islam didasarkan pada asal-usul ketuhanan dan berbeda dengan wacana Barat yang didasarkan pada doktrin filosofis sekuler. Namun demikian, bahan dasar demokrasi, sebagai metodologi untuk memperjuangkan masyarakat yang damai dan harmonis, mirip dengan filsafat doktrinal Islam. Filosofi politik Islam kondusif bagi proses demokrasi seperti kewajiban kesetiaan publik (*bay'a*), dorongan aturan konsultatif (*syura*), penekanan pada konsensus (*ijma*) dan pentingnya penalaran independen (*ijtihad*) yang merupakan indikasi kuat demokrasi dan pluralisme. Pada dasarnya, Nazrul memperlihatkan pertanyaan “is Islam incompatible with democracy?” dan menjawabnya dengan kepercayaan bahwa demokrasi merupakan nilai intrinsik dalam Islam jika berada dalam kepemimpinan dan otoritas yang mengakuinya yang memberi pandangan baru dalam mengargumenkan peran pemerintah, demokrasi dan kultur Islam dalam penelitian eskalasi Taliban.

³⁶ Md Nazrul Islam & Md Saidun Islam, “Islam and Democracy: Conflicts and Congruence”, (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2017), pp. 1- 19, <https://doi.org/10.3390/rel8060104>

Kajian berikutnya berjudul **“Post-Islamism and Fields of Contention after the Arab Spring”** oleh Markus Holdo memberi pandangan alternatif pada aplikasi demokrasi di negara-negara Arab dan Timur Tengah. Penelitian ini memberi pandangan alternatif terhadap konsep ‘post-islamism’ dimana berpendapat bahwa teori tersebut meremehkan perbedaan dalam “post-islamist societies”.³⁷ Berdasarkan teori lapangan, jurnal ini menunjukkan bagaimana post-Islamisme bergantung pada perjuangan politik. Ini berfokus pada tiga bidang yang peran politiknya telah diremehkan atau disalahartikan oleh para ahli teori pasca-Islam: feminisme Islam, jihadisme Salafi dan pemuda revolusioner. Sumber legitimasi dan pengakuan sosial memberikan petunjuk penting untuk memahami pertarungan konflik setelah Musim Semi Arab. Jurnal tersebut memberi argumen alternatif dalam menganalisa eskalasi kekuasaan Taliban, melihat bahwa konsep “post-islamism” memiliki perbedaan dalam semua negara sehingga penting untuk menggali kultur dan kondisi politik dalam negara untuk memperlihatkan faktor apa yang dapat mempengaruhi konflik.

Dalam pandangan terhadap topik *peace and democracy*, karya Dieter Fuchs dan Edeltraud Roller yang berjudul **“Conceptualizing and Measuring the Quality of Democracy: The Citizens Perspective”** memberi pandangan domestik terhadap aplikasi demokrasi pada kultur-kultur yang berbeda. Jurnal ini memberi pandangan bahwa meskipun kualitas dari demokrasi memiliki tolak ukur yang objektif (fair election, freedom of speech, dsb), aplikasi demokrasi sejatinya

³⁷ Markus Holdo, “Post-Islamism and fields of contention after the Arab Spring: feminism, Salafism and the revolutionary youth”, (Third World Quarterly, 2017), pp. 1800-1815, <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1233492>

didampingi oleh tolak ukur subjektif dari masyarakatnya.³⁸ Demokrasi merupakan hal yang subjektif bergantung pada tradisi historis dan konteks kultural bukan objektivitas dari institusi yang hadir. Sehingga, penelitian ini memberi argumen terhadap bagaimana aplikasi *functioning democracy* dapat menghasilkan interpretasi demokrasi dan *perceptiveness* atau kesiapan terhadap aplikasi demokrasi. Penting bagi penelitian ini, Fuchs dan Roller menitikberatkan unsur kesiapan terhadap aplikasi demokrasi yang penting untuk menganalisis persepsi demokrasi untuk masyarakat Afghanistan.

Jurnal terakhir yang berjudul **“Non-”Western” Liberalism and the Resilience of the Liberal International Order”** oleh Paul D. Miller memberi pandangan yang merangkum korelasi antara jurnal-jurnal sebelumnya dengan menganalisis pentingnya dan peran pandangan liberalisme dalam tata internasional. Miller menggambarkan bahwa dunia sekarang terlihat semakin menjauhi peran barat dalam penerapan demokrasi yang diakibatkan oleh aktor-aktor barat yang mulai melihat minimnya peran liberalisme dan sulitnya menerapkan demokrasi di negara-negara yang tidak memiliki pengalaman atau kepentingan untuk mengadopsi demokrasi barat.³⁹ Penelitian ini menekankan bahwa penting untuk mempertahankan resiliensi demokrasi barat dan hanya dapat dipertahankan jika pemimpin-pemimpin dapat mengartikulasikan ide-ide demokrasi barat dengan *“universal terms of human aspiration”* bukan aspirasi

³⁸ Dieter Fuchs & Edeltraud Roller, “Conceptualizing and Measuring the Quality of Democracy: The Citizens Perspective”, (Cogitatio, 2018), pp. 22-32, <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/1188/1188>

³⁹ Paul D. Miller, “Non-”Western” Liberalism and the Resilience of the Liberal International Order”, (The Washington Quarterly, 2018), pp. 137-153, <https://doi.org/10.1080/0163660X.2018.1485354>

barat, menjaga *world order* dan memberi contoh atas penerapan demokrasi yang baik di tanahnya sendiri. Pandangan Miller menjadi asas yang menekankan konsep liberalisme dimana penelitian ini berupaya untuk memberi pandangan yang berbeda dari Miller. Jurnal ini memberi pendalaman atas pandangan AS dalam penerapan demokrasinya dan juga menunjukkan perspektif negara non-barat terhadap aplikasi demokrasi yang mereka alami.

Kajian-kajian diatas sejatinya memberi masukan yang dapat membantu menambah kedalaman dari penelitian demokratisasi AS di Afghanistan. Pola utama yang terlihat dari keempat penelitian pertama berupa fokus dari penelitian terhadap konflik di Afghanistan yang bisa dikorelasikan dengan peran AS serta kultur yang ada di Afghanistan terhadap demokratisasi. Namun, keempat penelitian membawa fokus yang berbeda; dari kultur demokrasi Afghanistan, struktur demokratisasi oleh AS hingga intensi demokratisasi dibawakan oleh AS. Pola kedua yang terlihat dari keempat jurnal terakhir memberi pandangan alternatif terhadap penerapan demokrasi barat di negara-negara non-barat dan penekanan bahwa unsur pandangan masyarakat, kultur domestik dapat membentuk model-model demokrasi yang berbeda-beda. Sehingga penelitian ini akan melihat demokrasi melalui dua sisi yakni aktor yang menerapkan demokrasi (yakni AS) dan penerima demokrasi (yakni Afghanistan), dengan penekanan bahwa cara penerapan demokrasi dapat diinterpretasi dengan cara khusus oleh masyarakat Afghanistan.

Berangkat dari kajian literatur tersebut, penelitian ini akan mengambil *angle* yang berbeda terhadap kajian demokratisasi di Afghanistan melalui upaya

mengkorelasikan proses demokratisasi terhadap dampaknya kepada eskalasi Taliban yang belum ditekankan dalam penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini akan berupaya untuk memberi pandangan dampak demokratisasi yang berfokus pada waktu 2014 keatas agar melihat relevansi dan korelasinya secara lebih intim dengan meningkatnya kekuasaan Taliban hingga 2020. Walau melihat faktor, minim adanya penelitian yang mengkorelasikan penerapan demokratisasi dengan tingkat dan cara untuk aktor non-demokratik untuk mengambil kekuasaan. Sehingga penelitian ini berusaha menghadirkan perspektif lebih terfokus bagaimana aspek-aspek seputar demokratisasi AS dapat mempengaruhi bukan sistem negara Afghanistan secara general, namun dampaknya terhadap konflik kekuasaan aktor non-demokratik yang kerap muncul di wilayah Afghanistan. Dengan premis yang berbeda dari penelitian lainnya, penelitian ini berargumen bahwa demokratisasi menimbulkan celah untuk terjadinya konflik yang dapat dipermainkan oleh aktor non-demokratis untuk menguatkan pengaruhnya melalui penelitian terhadap proses demokratisasi AS dan korelasinya terhadap Taliban.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam upaya menganalisis bagaimana kekuasaan Taliban di Afghanistan dapat bereskalasi oleh upaya demokratisasi AS, penelitian ini akan menggunakan **konsep demokratisasi dan konsep *Protracted Social Conflict***. Sejatinya, masing-masing teori berkontribusi dalam menggambarkan fondasi dari demokratisasi dan korelasinya terhadap unsur-unsur domestik maupun

internasional yang dapat didampaki oleh ide dan proses demokratisasi sendiri dalam menimbulkan konflik.

Konsep Demokratisasi

Dalam menggambarkan kondisi dan batas-batasan dari demokratisasi serta aplikasi pandangan **demokratisasi dalam konteks konflik, penelitian ini menggunakan konsep Demokratisasi yang dikemukakan oleh Jack Snyder.** Konsep tersebut menjadi konsep yang melandasi penelitian ini dengan membantu dalam menjelaskan bagaimana demokratisasi dalam membangun ruang untuk terjadinya konflik yang berkontribusi pada eskalasi kekuasaan Taliban. Pada dasarnya, Jack Snyder menggambarkan demokratisasi sebagai eksistensi transformasi politik suatu negara yang mengarah pada demokrasi.⁴⁰ Sebuah proses demokratisasi mendorong kondisi negara terhadap dinamika *society* yang lebih terbuka, lebih inklusif dan partisipatoris beserta menjauh dari sistem otoriter dimana negara mengimplementasi sistem negara yang institusi, mekanisme serta kekuatan politik berkiblat pada *will of the people*.⁴¹ Konsep demokratisasi menitikberatkan bahwa negara tergolong menjalani demokratisasi jika mengadopsi setidaknya satu karakteristik yakni; *competitive politics, regular elections, broad participation, constraint on arbitrary use of power, free speech, and respect for civil liberties (including minorities)*.⁴² Dalam konsep Snyder,

⁴⁰ Jack Snyder, "From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict", pp. 15-24, https://adambrown.info/p/notes/snyder_from_voting_to_violence

⁴¹ Tom Gerald Daly, "The Alchemist: Questioning our Faith in Court as Democracy-Builders", Cambridge University Press, 2017, <https://www.cambridge.org/core/books/abs/alchemists/core-concept-democratisation/EFAEBA554EF7AA994F09E18506CA5413>

⁴² Jack Snyder, "From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict", pp. 15-24, https://adambrown.info/p/notes/snyder_from_voting_to_violence

Competitive politics dipandang sebagai arena politik negara yang terbuka bagi aktor-aktor eksekutif, legislatif maupun yudikatif seperti kebebasan dalam membentuk partai dan aplikasi calon pemilu yang tidak diskriminatif. *Regular elections* dan *broad participation* merujuk pada sistem politik, khususnya pemilu, yang dilakukan secara sistematis dan berkala serta menghasilkan kondisi yang inklusif dan mengundang bagi partisipasi masyarakat. Snyder juga menekankan adanya *constraint on arbitrary use of power* yang menekankan minimnya penggunaan kekerasan dalam resolusi konflik khususnya kesetaraan dalam negara untuk secara seksama meminimalisir penggunaan kekerasan oleh pemerintah. Terakhir, kebebasan berbicara dan kesadaran untuk kebebasan sipil terlihat melalui perilaku pemerintah untuk menghasilkan negara yang menghormati opini sesama masyarakat, tidak adanya penindasan atas kebebasan berbicara serta pengertian asas *rule of law* dalam negara. Tingkat dari demokratisasi dibedakan melalui *mature democracy* dan *democratizing states*, namun konsep demokratisasi selalu berpatok pada proses kebijakan negara (kebijakan luar negeri maupun domestik dan militer) serta wewenang pemerintah yang diiringi oleh suara masyarakat.⁴³

Snyder pun mendefinisikan konsep demokratisasi dengan caranya sendiri dimana konsep demokratisasi dikerangkakan dalam konteks konflik dengan beberapa asumsi utama yakni adanya kapabilitas dalam demokratisasi untuk memicu terjadinya konflik. Snyder percaya bahwa negara dipandang paling *war-prone* mau itu dalam konflik *interstate* maupun *intrastate* dalam tahap awal

⁴³ Ibid.

demokratisasi atau sebelum menjadi *mature democracy*. Snyder menekankan bahwa proses di balik reform demokratisasi dapat meningkatkan probabilitas terjadinya konflik.⁴⁴ Melalui transisi demokratisasi membuka ruang untuk negara menjadi lebih agresif. Ditambah, regime yang dalam fase transisi yang mengalami mobilisasi politik yang tinggi akan membuka ruang untuk konflik jika diiringi dengan kontrol institusi yang lemah.⁴⁵

Kedua, Snyder berasumsi bahwa proses di balik demokratisasi sendiri “*can be the basis for belligerent nationalist coalition*” berdasarkan metode yang diambil oleh sebuah negara ataupun negara yang membantu implementasi demokratisasi dan tingkat demokratisasi yang mereka alami.⁴⁶ Hal tersebut bersangkutan dengan proses yang diterapkan oleh elit lama terhadap masyarakatnya. Snyder menitikberatkan bahwa demokratisasi membuka ruang untuk sentimen nasionalis yang terbentuk oleh elit lama, termasuk kalangan militer, yang sering berusaha untuk mendefinisikan diri mereka sebagai penjaga tujuan nasionalis, mengingatkan rakyat akan bahaya yang mereka hadapi secara kolektif. Namun, demokratisasi juga membuka ruang untuk aktor lainnya (termasuk aktor non-demokratis) untuk mendorong sentimen nasionalis tersebut. Kelompok kepentingan yang dapat muncul juga cenderung memanfaatkan isu-isu dan merasa terdorong untuk menegaskan kredensial nasionalis mereka sebagai sarana untuk menyatukan kepentingan yang terfragmentasi yang muncul ke permukaan dalam lingkungan politik yang tidak stabil. Sementara massa mungkin

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ David Kinsella & David L. Rousseau, “Democracy and Conflict Resolution”, (The Sage Handbook of Conflict Resolution), pp. 481, <https://web.pdx.edu/~kinsella/offprints/shcr09.proof.pdf>

tidak terlalu rentan terhadap konflik pada awal proses ini, seruan yang berkelanjutan terhadap nasionalisme dari seluruh spektrum politik dapat dengan cepat menciptakan suasana berkonflik atau berperang. Ditambah, kapabilitas negara akan menentukan bagaimana masyarakat mengasosiasikan diri dengan nilai dan kultur negaranya. Dalam kata lain, aksi dari pemerintah dalam proses demokratisasi membuka ruang untuk membentuk identitas masyarakat dimana Bagaimana negara diikutsertakan dalam kehidupan politik menentukan jenis kesadaran nasional yang mereka kembangkan.⁴⁷

Ketiga, Snyder percaya konflik dalam demokratisasi terdorong oleh *populist nationalism* yang terjadi akibat “Populist-Rivalries”.⁴⁸ Asumsi tersebut menekankan bahwa *populist nationalism* dapat terpicu pada awal perubahan demokratisasi dimana proses demokratisasi memicu *political attachment* terhadap perbedaan kultural, linguistik, agama dan region antara kelompok-kelompok dalam negara. Hal tersebut dapat diasosiasikan dengan ancaman yang muncul dari demokratisasi. Ancaman membuat para elit dan “kelompok sosial lainnya” terpaksa menggunakan kekerasan untuk mendapatkan kembali kontrol dan status quo.⁴⁹ Grup yang sama mungkin juga menggunakan ketidakstabilan politik yang terjadi dalam transisi – sebelum demokrasi institusi dan demokrasi penuh telah dibentuk – untuk agenda mereka sendiri. Sehingga demokratisasi memberi ruang untuk terbongkarnya *long-held and popular aspirations*.⁵⁰

⁴⁷ Jack Snyder, “From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict”, pp. 28, https://adambrown.info/p/notes/snyder_from_voting_to_violence

⁴⁸ Ibid. pp. 486.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Oliver Rambotham, “The Analysis of Protracted Social Conflict; Tribute to Edward Azar”, Cambridge University Press, *Review of International Studies* Vol 31, 2005, pp. 111, <https://www.bbau.ac.in/dept/dps/TM/Edward%20Azar.pdf>

Konsep *Protracted Social Conflict*

Dalam memenuhi gambaran bagaimana demokratisasi sendiri dapat memicu konflik yang berjangka panjang dan bereskalasi, ***Protracted Social Conflict (PSC)*** oleh Edward Azar menjadi konsep pokok dalam penelitian ini. Konsep PSC khususnya menggambarkan bagaimana konflik yang dihasilkan oleh demokratisasi dapat membangun kondisi optimal untuk Taliban meningkatkan kekuasaannya. Konsep PSC pada dasarnya menggambarkan *hostile interactions* yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dengan pecahnya perang terbuka sporadis yang berfluktuasi dalam frekuensi dan intensitas.⁵¹ PSC berfokus untuk melihat faktor apa yang mempengaruhi dinamika sebuah konflik sehingga berlarutnya konflik tersebut dapat terjadi.⁵² Teori tersebut memperlihatkan faktor domestik dan internasional di balik sebuah konflik untuk mempertimbangkan berbagai unsur yang menghasilkan konflik yang sulit terhenti serta bagaimana cara terbaik menyelesaikannya.⁵³ Dalam kondisi Taliban, teori ini dapat berguna untuk menganalisa faktor menghasilkan **kekuasaan fluktuatif terhadap Taliban** yang dalam penelitian akan melihat pengaruh spesifik oleh upaya dan proses demokratisasi oleh AS. Teori tersebut dapat menjelajahi faktor domestik yang dipengaruhi oleh upaya internasional AS sehingga terjadinya kekuasaan Taliban yang meningkat serta berkelanjutan. Faktor kenapa konflik Taliban dapat berlarut

⁵¹ Ibid.

⁵² Edward E. Azar, Paul Jureidini, Ronald McLaurin, "Protracted Social Conflict; Theory and Practice in the Middle East", *Journal of Palestine Studies* (1978) 8 (1): pp. 41–60, <https://doi.org/10.2307/253610>

⁵³ Edward E. Azar & Nadia Farah, "The structure of inequalities and protracted social conflict: A theoretical framework, *International Interactions*", 7:4, pp. 317-335, DOI: 10.1080/03050628108434558

karena upaya demokratisasi AS akan diperdalam melalui komponen *process dynamics* PSC serta konsep-konsep yang terikat padanya.

Menurut Azar, *process dynamics* merupakan variabel yang bertanggung jawab atas aktivasi konflik terbuka yang berangkat dari prekondisi yang membentuk konflik. Menurut Azar terdapat tiga faktor penentu utama dari aktivasi sebuah konflik. Pertama, *Communal Actions and Strategies*, berpacu pada potensi berbagai 'pemicu' yang mengaktifkan konflik laten, yang kemudian mengeskalasinya menjadi konflik yang lebih luas dan konflik yang lebih sengit. Konflik tersebut terpicu oleh *trivial event* atau suatu kejadian yang awalnya tidak krusial namun dapat menjadi sebuah *turning point* yang membentuk "*victimization that is collectively recognized*". Azar menekankan bahwa rasa viktimisasi dapat membentuk berbagai aksi dan strategi yang diinisiasi secara komunal oleh komunitas yang merasakan dampak negatif dari *trivial event* tersebut. Kejadian tersebut merambas kepada isu-isu yang melebihi *initial event* seperti keamanan komunal atau akses terhadap kebutuhan pokok. Kejadian yang Azar sebut sebagai "*spill over effect*" memicu momentum untuk aktor komunal membentuk berbagai strategi dan taktik yang mengeskalasi konflik tersebut. Sehingga seberapa tereskalasinya konflik tersebut bergantung pada kemampuan kelompok-kelompok komunal untuk secara efektif mengatur dan mengembangkan kepemimpinan yang kuat serta kecenderungan mereka untuk mengumpulkan dukungan di luar batas-batas nasional.⁵⁴

⁵⁴ Oliver Ramsbotham, "The Analysis of Protracted Social Conflict: A Tribute to Edward Azar," (*Review of International Studies* 31, No. 1, 2005), pp. 109-126, <https://www.jstor.org/stable/40072074>

Kedua, *State Actions and Strategies*, berkonsentrasi pada proses pengambilan keputusan dan situasi pemerintah secara kolektif atau individual, untuk menyelesaikan konflik.⁵⁵ Negara biasanya diminta untuk mengakomodasi kebutuhan dan keluhan komunal terlebih dahulu. Namun demikian, seringkali negara memilih tindakan koersif, mempertimbangkan biaya politik dan ekonomi, prinsip *'Winner-takes-All,'* serta melihat akomodasi sebagai tanda kemunduran atau kelemahan. Strategi yang digunakan oleh negara dalam mengatasi *communal dissent* menentukan justifikasi untuk aksi-aksi kekerasan dan menentukan seberapa eskalasi konflik yang terjadi.

Ketiga, *Built in Mechanisms of Conflict* bahwa pengalaman konflik historis dan komunikasi antara kelompok-kelompok yang berkonflik akan mempengaruhi proses PSC. Ini akan mengatur persepsi dan motivasi terhadap satu sama lain.⁵⁶ Azar menekankan bahwa *"the perceptions and cognitive processes generated through experience of conflictual interactions"* dapat meningkatkan konflik antara aksi dan strategi komunal dan negara.⁵⁷ Sehingga, mispersepsi, stereotip, polarisasi dan *"tunnel vision"* yang ditunjukkan oleh komunitas yang berkonflik satu sama lain adalah tanggung jawab untuk, dan juga produk dari, dua variabel yang disebutkan di atas.⁵⁸

Dengan pengertian konsep PSC, konsep tersebut menjadi acuan penelitian ini karena kapabilitasnya dalam menjelaskan dinamika antara faktor domestik dan

⁵⁵ Ibid, pp. 117.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Evagoras C. Leventis, "Protracted Social Conflict Analysis and Cyprus: An Assessment", *The Cyprus Review* Vol. 19 Fall 2007, pp. 42.

⁵⁸ Edward E. Azar, "The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases", (Darmoth, 1990), pp. 15.

internasional di balik sebuah konflik serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi berlarutnya sebuah konflik. Selain itu, PSC menjadi sebuah konsep yang dapat mendalami faktor-faktor internal sebuah negara seperti *human needs*, *communal needs* maupun *government action* yang dapat berkontribusi untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghasilkan kondisi kurang optimal jika dikorelasikan dengan proses demokratisasi yang AS terapkan. Konsep PSC dengan holistik dapat menggambarkan faktor-faktor internal maupun eksternal di balik proses demokratisasi dan membantu memetakan dalam bagian manakah mempengaruhi berlarutnya kuasa Taliban di Afghanistan. Konsep tersebut dapat membantu menempatkan demokratisasi sebagai variabel yang mempengaruhi kekuasaan Taliban dan bagaimana proses tersebut mengeskalisasi kekuasaan Taliban dalam jangka waktu tertentu.

1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk melihat dampak demokratisasi terhadap eskalasi kekuatan domestik Taliban di Afghanistan berpacu pada metode penelitian kualitatif. Metode Kualitatif yang dimaksud merujuk pada penelitian yang berfokus pada meneliti makna (*meanings*) dan pemahaman (*understanding*) melalui berbagai sumber yang dapat diobservasi dan analisa.⁵⁹ Dengan menggunakan metode kualitatif ini dapat menjelajahi pemahaman mendalam

⁵⁹ Alan Bryman, “*Social Research Methods*”, 4th ed. (New York: Oxford University Press, 2012), pp. 380.

tentang pengalaman, perspektif dan sejarah yang sifatnya konteks-sensitif.⁶⁰ Hal tersebut sangat berharga bagi penelitian ini karena dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang aktor yang terlibat di dalamnya dan meneliti interaksi antar aktor dalam menghasilkan sebuah fenomena tertentu.⁶¹ Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat berkontribusi untuk melihat dampak secara non-numerik (historis dan berdasarkan kejadian nyata) di balik elemen-elemen demokratisasi seperti bantuan yang diberikan AS dalam bentuk militer, strategi demokratisasi yang diterapkan, perubahan struktur politik dan aksi-aksi media terhadap Taliban serta eskalasi Taliban sendiri di Afghanistan.

Metode penelitian kualitatif dirasa paling tepat karena kapabilitasnya dalam membantu interpretasi kejadian yang berada pada *setting* Afghanistan dengan melihat. Metode tersebut dapat memberi pandangan pada kedua variabel yakni proses demokratisasinya sendiri dan juga perilaku Taliban selama demokratisasi diterapkan. Hal tersebut dapat dilakukan karena metode kualitatif dapat memperlihatkan perilaku dan pola-pola yang berkontribusi pada hipotesis penelitian, menganalisa variabel menggunakan metode sebab-akibat dan juga menyediakan pandangan historis⁶² yang memperlihatkan dinamika Taliban. Metode tersebut sejalan dengan tujuan penelitian untuk melihat dampak dari kedua variabel yang perlu diuji secara statistik dan perilaku. Dengan metode sedemikian rupa, peneliti akan berkontribusi dalam segi pengumpulan data,

⁶⁰ John Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches", 2nd edition, (2002), pp. 208.

⁶¹ W. Lawrence Neuman, "*Basics of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches*, 3rd ed.", (Essex: Pearson Education Limited, 2014), pp. 133-139.

⁶² Ibid, 132.

menganalisis dan interpretasi pola data/informasi serta mengaplikasikan teori yang menjadi basis pada penelitian ini.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan metode penelitian, penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan dan studi data sekunder berbentuk numerik dan non-numerik. Penelitian ini menekankan data sekunder seperti dokumen negara dan organisasi negara yang beroperasi dalam bidang demokratisasi, dokumen perjanjian bilateral antar negara, dokumen analisis kebijakan dari organisasi terkait, literatur berupa jurnal ilmiah dan buku yang dapat diakses secara virtual di internet yang relevan dengan topik demokratisasi AS di Afghanistan. Bentuk-bentuk data sekunder yang dikumpul menitikberatkan dokumentasi upaya dan dampak dari demokratisasi AS yang berpacu pada pandangan aktor AS serta masyarakat Afghanistan yang merasakan proses demokratisasi. Selain itu, data tersier juga diberdayakan dalam penelitian ini yang berupa sumber-sumber berita dan dokumentasi media yang memperlihatkan kejadian terupdate terkait dengan topik yang diangkat yang akan melalui triangulasi agar meningkatkan akurasi penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberi pengertian terhadap topik dan menjabarkan hipotesis penelitian dengan koheren dan efektif, penelitian ini dibagi menjadi 5 bab utama yang berisi sub-bab seperti berikut;

Bab I penelitian ini berupa bagian fondasi dari keseluruhan penelitian yang berfokus pada pemaparan latar belakang masalah terkait sejarah demokratisasi AS dan dinamika kelompok Taliban dan identifikasi masalah (yang terdiri dari deskripsi masalah dan perumusan masalah) yang berfokus pada pokok diskusi atau problematika pada penelitian. Berdasarkan urgensi yang dapat dibangun melalui latar belakang masalah, bab ini akan menggali hipotesis penelitian melalui kajian literatur dan kerangka pemikiran agar secara keseluruhan dapat memberi gambaran atas topik penelitian serta mengapa patut diteliti.

Bab II yang berjudul “Proses Demokratisasi Amerika Serikat di Afghanistan” berfokus kepada pemaparan upaya-upaya demokratisasi AS dan dampak yang hadir di Afghanistan yang merupakan variabel independen penelitian ini. Bab ini akan berfokus pada upaya demokratisasi dibawah kepemimpinan Ashraf Ghani melalui AS yang dibagi menjadi dua fase yaitu pada masa kepresidenan pertama dari September 2014 - 2018 dan masa kedua pada tahun 2018-2020. Selain itu, penelitian ini akan melihat perubahan politik, sosial dan ekonomi yang terjadi melalui demokratisasi AS terhadap Afghanistan.

Bab III berfokus pada pemetaan kondisi Taliban di Afghanistan dalam tahun 2014-2020. Bab ini akan menggambarkan sejarah di balik Taliban terlebih dahulu yang menyertakan asal Taliban, visi dan tujuan Taliban serta demografis Taliban di Afghanistan. Berangkat dari pemaparan tersebut, bab ini berfokus untuk menjelaskan kondisi Taliban di Afghanistan dari segi sosial, politik dan ekonomi selama jalannya demokratisasi pada tahun 2014-2020.

Bab IV akan menjelajahi bagian analisa antara kedua variabel independen dan dependen menggunakan kerangka berfikir demokratisasi dan *protracted social conflict*. Bab ini akan menganalisa tiga argumen utama yakni;

Bab V akan menjadi kesimpulan yang menggarisbawahi bagaimana proses demokratisasi yang dilakukan oleh AS dapat berkontribusi terhadap berlarutnya dan meningkatnya kekuasaan Taliban di Afghanistan menggunakan konsep demokratisasi dan *protracted social conflict*. Bab ini akan ditutup dengan menyediakan rekomendasi agar menangani isu berlarutnya kekuasaan Taliban menggunakan pola analisis yang ditemukan pada bab-bab sebelumnya.